

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514

Email : inspektorat@mail.kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

TENGGARONG

Tenggarong, 07 Agustus 2020

Nomor : Itkab-700/298/LHE-SAKIP/VIII/2020
Lampirn : 1 (satu) berkas LHE
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. -----

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
Di – **Tenggarong**

Kami telah melakukan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana perihal tersebut di atas. Evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan hasil sebagai berikut :

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Surat Kementerian PAN dan RB No. B/23/M.PANRB/08/2016 tanggal 22 Juni 2016, Prihal : Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2016.
- c. Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor. B/119/AA.04/2019 tanggal 13 Agustus 2019, Prihal : Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Tahun 2019.
- d. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Itkab – 094/367/ST-SAKIP/VII/ 2020 tanggal 06 Juli 2020

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahnya, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP tersebut.

3. Tujuan Evaluasi
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP SKPD.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
4. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan selama Lima Belas (15) hari terhitung mulai Tanggal 06 Juli sampai dengan selesai.
5. Ruang Lingkup dan Metodologi Evaluasi.
 - a. Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
Selain itu pula, dilaksanakan terhadap :
 - Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sitem pengukuran kinerja.
 - Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja.
 - Evaluasi terhadap program dan kegiatan, dan
 - Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
 - b. Metodologi evaluasi dengan teknik ” *criteria referenced survey* ”, menilai secara bertahap setiap komponen dengan kriteria evaluasi yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi.
 - c. Metodologi evaluasi dengan teknik ” *self assesment* ” yakni penilaian internal secara mandiri dengan memberikan quesioner terhadap penilaian pribadi OPD yang tidak ada dalam template kertas kerja evaluasi.
6. Batasan Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan terhadap Sistem Akuntabilitas pada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Penilaian Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dan predikat D, C, CC, B, BB, A, AA dengan rincian sebagai berikut :

 - a. Nilai 0 s.d. 30, predikat penilaian “D” (Sangat Kurang)
 - b. Nilai> 30 s.d. 50, predikat penilaian “C” (Kurang)
 - c. Nilai> 50 s.d. 60, predikat penilaian “CC” (Cukup/Memadai)
 - d. Nilai> 60s.d. 70, predikat penilaian “B” (Baik)
 - e. Nilai> 70s.d. 80, predikat penilaian “BB” (Sangat Baik)
 - f. Nilai> 80 s.d. 90, predikat penilaian “A” (Memuaskan)
 - g. Nilai> 90s.d. 100, predikat penilaian “AA” (Sangat Memuaskan)
8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada hasil evaluasi Tahun sebelumnya, telah dilakukan upaya perbaikan berupa :

- Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Sedangkan atas rekomendasi yang belum dilakukan perbaikan berupa rekomendasi terdahulu sudah ditindak lanjuti.

9. Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2019 memperoleh nilai sebesar **78,82 (Tujuh Puluh Delapan Koma Delapan Puluh Dua)** atau dengan predikat penilaian “ **BB** ” (**Sangat Baik**). Penilaian tersebut menunjukkan Akuntabilitas Kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Organisasi Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Rincian penilaian tersebut sebagaimana berikut :

No.	Komponen Yang Dinilai	HASI PENILAIAN EVALUASI AKIP			
		Bobot (%)	Nilai Tahun 2018	Nilai Tahun 2019	Peningkatan/ penurunan capaian (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,97	25,00	0,03
2	Pengukuran Kinerja	25	19,77	19,38	0,39
3	Pelaporan Kinerja	15	10,84	11,59	0,75
4	Evaluasi Internal	10	7,83	7,23	0,6
5	Pencapaian Kinerja	20	14,38	15,64	1,26
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,78	78,82	1,04
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	

Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa secara umum sudah terdapat kemajuan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan Tahun yang lalu. Uraian hasil evaluasi tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

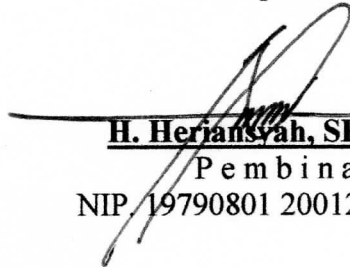
1. Renstra belum dipublikasikan.
2. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon II, IV, dan Staf belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.
4. Laporan Target Kinerja belum bisa dimonitor pencapaiannya.
5. Laporan kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome/informasi kinerja yang lebih handal.
6. Laporan Kinerja belum menyampaikan laporan analisis efesiensi penggunaan sumber daya.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan SAKIP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang kami rekomendasikan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan tehnologi informasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan perbaikan implementasi penerapan SAKIP di masa akan datang serta atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Inspektur



H. Heriansyah, SE, M.Si
P e m b i n a
NIP. 19790801 2001212 1 001